

PANDANGAN ORIENTALIS TERHADAP POLIGAMI: STUDI KRITIS STEREOTIP DAN DISKRIMINASI

Siti Nur Azizah, Safiin Mansur

azizahsitinurazizah420@gmail.com, Safiin@uinbanten.ac.id

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

ABSTRAK

Studi ini menganalisis konstruksi wacana orientalisme Barat (abad ke-18-awal ke-20) terhadap praktik poligami dalam masyarakat Muslim. Penelitian berargumen bahwa poligami dalam narasi orientalisme direduksi menjadi stereotip yang berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan kolonial. Dengan metode analisis wacana kritis terhadap teks sastra, seni visual, tulisan akademis era kolonial, serta kebijakan ekonomi-politik material, penelitian mengungkap tiga narasi utama: (1) poligami sebagai simbol despotisme dan sensualitas liar Timur; (2) sebagai indikator saintifik keterbelakangan; (3) sebagai bukti penindasan perempuan pasif. Konstruksi ini dicapai melalui penghapusan sistematis terhadap konteks hukum Islam, agensi perempuan, variasi praktik, serta logika ekonomi-politik yang mendasarinya. Temuan menunjukkan warisan stereotip ini terus bereproduksi dalam budaya populer, kebijakan diskriminatif, dan retorika Islamofobia kontemporer. Analisis mengungkap bahwa wacana stereotip juga berfungsi sebagai kedok (smokescreen) untuk intervensi material melalui sistem pajak, hukum properti, dan pengadilan yang justru menciptakan kondisi yang lebih eksploitatif bagi perempuan. Dekonstruksi wacana orientalisme dan pemahaman atas dimensi materialnya menjadi prasyarat untuk dialog antarbudaya yang setara dan kontekstual.

Kata Kunci : Orientalisme, Poligami, Stereotip, Harem, Kolonialisme, Islamofobia, Ekonomi Politik, Reproduksi Sosial.

ABSTRACT

This study analyzes the construction of Western Orientalist discourse (18th-early 20th century) on the practice of polygamy in Muslim societies. The research argues that polygamy in Orientalist narratives was reduced to a stereotype that functioned as a tool for legitimizing colonial power. Using the critical discourse analysis method on literary texts, visual art, academic writings from the colonial era, as well as material political-economic policies, the research reveals three main narratives: (1) polygamy as a symbol of Eastern despotism and wild sensuality; (2) as a scientific indicator of backwardness; (3) as evidence of the oppression of passive women. This construction was achieved through the systematic erasure of Islamic legal contexts, women's agency, variations in practice, and the underlying political-economic logic. The

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

findings show that the legacy of these stereotypes continues to be reproduced in contemporary popular culture, discriminatory policies, and Islamophobic rhetoric. The analysis reveals that stereotypical discourse also functioned as a smokescreen for material interventions through tax systems, property law, and courts which in fact created more exploitative conditions for women. Deconstructing Orientalist discourse and understanding its material dimensions is a prerequisite for equal and contextual intercultural dialogue.

Keywords : Orientalism, Polygamy, Stereotype, Harem, Colonialism, Islamophobia, Political Economy, Social Reproduction.

PENDAHULUAN

Hubungan Barat dengan Timur, dan khususnya dengan dunia Muslim, memiliki sejarah panjang produksi pengetahuan yang tidak seimbang dan hegemonik, sebuah paradigma yang pada akhir tahun 1970-an, Edward Said (1978) mengecam, dan terkenal menyebutnya, "Orientalisme".¹ Namun, buku Said jauh lebih dari sekadar studi tentang citra dan prasangka. Ini adalah studi tentang bagaimana "Orient" (Timur) secara diskursif dikonstruksikan sebagai Yang Lain yang koheren, tunggal, terpisah, dan inferior oleh kekuatan intelektual dan politik Eropa. Orientalisme sekaligus merupakan proyek epistemologis dan politik, ini adalah konstruksi seluruh epistemologi (dalam sastra, seni, sejarah, filologi, dan kemudian ilmu sosial) yang menamai, mengklasifikasikan, mendefinisikan, dan dengan demikian mendominasi Timur.² Dalam wacana hegemonik ini, lembaga-lembaga sosial masyarakat "Oriental" tidak dipelajari dalam kompleksitas dan historisitasnya sendiri, tetapi lebih sering dikenai penilaian moral. Mereka diukur berdasarkan nilai-nilai yang disajikan sebagai nilai-nilai Eropa tetapi sebenarnya bersifat universal: rasionalitas, kemajuan, kebebasan individu. Dari semua institusi yang menjadi sasaran dengan cara ini, poligami khususnya mengalami transformasi diskursif. Dari praktik sosial yang terlokalisasi, bernuansa, terbatas jumlahnya, dan tertanam dalam jaringan hubungan hukum, ekonomi, dan budaya tertentu, dalam wacana Orientalis, poligami menjadi kiasan diskursif yang sarat dengan makna simbolis. Dalam imajinasi Orientalis, poligami mewakili segala sesuatu yang diwakili oleh "liyan" (Yang Lain): ekonomi yang secara moral dan sosial terbelakang, politik yang despotik (kekuasaan rumah tangga laki-laki adalah mikrokosmos kekuasaan otokrat), sensualitas yang dekaden dan korup, mengancam kemurnian dan pengendalian diri Eropa.³ Meyda Yeğenoğlu (1998) telah menunjukkan bagaimana feminitas Timur (yang diwujudkan dalam fantasi Orientalis oleh harem dan perempuan-perempuan poligami di dalamnya) menjadi ruang tempat Barat memproyeksikan fantasi dan kecemasannya, dan dengan demikian membenarkan intervensi "pencerahan" mereka sendiri.⁴

Leila Ahmed (1992) menegaskan bahwa representasi poligami sebagai patologi sosial tidak benar-benar mencerminkan fakta atau studi netral.⁵ Ia adalah konstruksi yang berkelindan dengan

¹ Miftahul Ulum Bahtiar Yunika Sari, Pujawati, "Orientalism: Edward Said's Postcolonial Thoughts and Theories Against the Eastern World and Islam," *Gunung Djati Conference Series* 23 (2023): 145–64.

² Yunika Sari, Pujawati.

³ Iman Akbar Sobari et al., "CITRA STEREOTIPIKAL ORANG PRIBUMI PADA NOVEL JEJAK LANGKAH KARYA PRAMOEDYA ANANTA TOER : KAJIAN PASCAKOLONIAL," *JPeB JURNAL PENELITIAN BUDAYA* 10, no. 1 (2025): 54–76.

⁴ Meyda Yeğenoğlu, *Colonial Fantasies: Towards a Feminist Reading of Orientalism*, 1998.

⁵ Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam Historical Roots of a Modern Debate*, 1992.

tiga kepentingan besar. Yang pertama adalah kepentingan kekuasaan kolonial yang membutuhkan alasan untuk mendominasi dan "membimbing" masyarakat yang dianggap belum dewasa. Yang kedua adalah fantasi seksual yang terpendam dan proyeksi hasrat yang direpresi dalam masyarakat Victoria, menemukan saluran "aman" dalam gambaran erotis harem yang eksotis. Yang ketiga adalah kebutuhan psikologis dan ideologis untuk terus menegaskan superioritas peradaban Barat. Namun, fondasi material dan ekonomi-politik yang sama pentingnya sering kali diabaikan ketika berfokus pada dimensi wacana dan representasi, seperti yang terlihat dalam banyak penelitian pascakolonial awal. Fondasi material ini tidak hanya membentuk praktik poligami sosial yang nyata, seperti pasar kerja, hukum waris, dan struktur agraria, tetapi juga mengoperasionalkan stereotip Orientalis menjadi kebijakan transformatif dan eksploitatif. Meskipun wacana memberikan legitimasi, kekuatan material mengubah situasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dialektis yang melihat bagaimana narasi tentang "poligami yang dekaden" mengubah kehidupan keluarga di masyarakat jajahan melalui undang-undang, regulasi administratif, kebijakan fiskal, dan intervensi sosial. Dalam hal ini, penekanan pada masa puncak imperialisme Eropa terutama dari abad ke-19 hingga awal abad ke-20 menjadi sangat penting dan relevan.

Pengetahuan tentang "Timur" tidak lagi eksklusif untuk petualang aneh dan filsuf di era imperialisme ini.⁶ Untuk secara eksplisit membantu mesin pemerintahan kolonial, pengetahuan secara sistematis diorganisasikan. Sekolah-sekolah Orientalis, komunitas ilmu pengetahuan kolonial, biro statistik, dan lembaga penelitian didirikan untuk memetakan, mengkatalog, dan mempelajari setiap aspek masyarakat terjajah, termasuk praktik pernikahan dan struktur keluarga.⁷ Misalnya, survei sensus berfungsi sebagai alat penting untuk mengkuantifikasi dan mengkategorikan praktik poligami, seringkali dengan kategorisasi yang ketat dan terlepas dari konteks lokal (seperti mengabaikan perbedaan besar antara teori poligami dalam hukum Islam dan praktiknya yang terbatas pada kelompok ekonomi tertentu). Pemerintah kolonial kemudian menanggapi data yang dikumpulkan sebagai "fakta" objektif yang menunjukkan keterbelakangan masyarakat setempat dan menciptakan masalah sosial yang memerlukan solusi dari pemerintah. Pada saat yang sama, kebijakan material kolonial secara konkret dan langsung mengubah struktur keluarga. Ini seringkali memiliki dampak yang paradoks atau justru meningkatkan ketimpangan. Dua instrumen utama dalam hal ini adalah hukum properti dan perpajakan.⁸ Pemerintah kolonial, seperti Inggris di India dan Afrika atau Prancis di Maghrib, sering kali menerapkan sistem kepemilikan tanah individual yang berpatok pada kepala keluarga laki-laki. Karena kebijakan ini dapat "diamankan" atau mengelola lebih banyak tanah dengan menikahi beberapa perempuan yang memimpin bagian-bagian berbeda atau dengan mendirikan aliansi klan melalui pernikahan, kebijakan ini dapat secara tidak langsung mendorong poligini di kalangan petani kaya. Sebaliknya, kebijakan pajak yang memberatkan, seperti pajak atas setiap istri, dapat berfungsi sebagai alat disinsentif langsung yang mencerminkan upaya merekayasa sosial yang didasarkan pada nilai-nilai Eropa.

Selain itu, intervensi hukum dalam bidang keluarga telah menjadi topik yang sangat diperdebatkan. Pemerintah kolonial sering kali mengeluarkan "hukum pribadi" (personal law) untuk komunitas Muslim, tetapi melakukannya dengan cara yang membekukan dan menyederhanakan berbagai interpretasi hukum Islam yang berlaku.⁹ Mereka memilih versi tertentu seringkali dari

⁶ Sobari et al., "CITRA STEREOTIPIKAL ORANG PRIBUMI PADA NOVEL JEJAK LANGKAH KARYA PRAMOEDYA ANANTA TOER : KAJIAN PASCAKOLONIAL."

⁷ Budi Wibowo, Dwi Agung Hernanto, and Penulis Publikasi Pameran, *Sonobudoyo Sejarah Dan Identitas Keistimewaan*, 2018.

⁸ Aidil Aulya, "Hegemoni Kekuasaan Dalam Politik Hukum Keluarga Di Indonesia," *INNOVATIVE: JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH* 2, no. 1 (2022): 790–801.

⁹ Court Review, Jurnal Penelitian, and Hukum Vol, "DETERMINASI PETANI DALAM HUKUM AGRARIA DI INDONESIA," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2023): 36–50.

mazhab yang lebih tekstual dan menaikkan statusnya menjadi hukum positif yang diterapkan oleh pengadilan kolonial. Para ahli mengkritik proses "pembekuan" ini karena dapat membuat praktik seperti poligami terlihat lebih kaku dan lebih sering dilakukan secara hukum daripada sistem hukum pra-kolonial yang lebih fleksibel.¹⁰ Sebaliknya, kaum reformis Muslim dan nasionalis awal juga mulai menggunakan wacana kolonial tentang kesetaraan dan kemajuan untuk mengkritik poligami dari dalam dan menuntut reinterpretasi agama. Akibatnya, kebijakan kolonial menciptakan medan pertempuran baru di sekitar masalah keluarga, di mana elit lokal, otoritas agama, dan administrator kolonial memperebutkan makna dan kontrol atas institusi sosial.

Perlu dipertimbangkan bagaimana poligami digambarkan sebagai masalah sosial dan masalah kesehatan masyarakat, seperti hubungannya dengan penyebaran penyakit yang digunakan untuk membenarkan kontrol atas tubuh perempuan.¹¹ Perempuan dari komunitas terjajah dianggap sebagai penyebab penyakit dan dekadensi, sehingga mereka sering difokuskan pada kampanye kesehatan publik, aturan prostitusi, dan inspeksi medis. Ini merupakan pertemuan antara fantasi seksual Orientalis dan biopolitik kolonial, di mana perempuan Muslim menjadi objek ganda: objek hasrat eksotis sekaligus objek intervensi moral dan medis yang represif.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan paradigma kualitatif dan menggunakan metode Analisis Wacana Kritis.¹² Metode ini dipilih untuk menunjukkan bagaimana teks, praktik diskursif, dan konteks sosial-politik relasi kuasa yang tidak setara berkorelasi satu sama lain (Fairclough, 1995). Selain itu, penelitian menggunakan kerangka ekonomi politik kolonial dan feminis untuk melihat arsip administratif dan kebijakan untuk menjawab dimensi material. Analisis dilakukan secara bertahap dan integratif: (1) menjelaskan secara rinci bagaimana poligami dan harem digambarkan dalam setiap teks dan kebijakan; (2) memahami makna, dikotomi antara Timur dan Barat, primitif dan barbar, serta posisi subjek dan logika ekonomi politik di balik kebijakan; dan (3) memberikan penjelasan dengan mengaitkan pola wacana dan intervensi material dengan konteks imperialisme. Teori yang digunakan termasuk orientalisme Said, feminis pascakolonial (Ahmed, 1992; Mohanty, 1984), konsep Othering, dan teori akumulasi kapital kolonial (Federici, 2004). Dengan menggabungkan berbagai jenis data (sastra, seni, akademik, dan kebijakan), keabsahan data dapat dijamin.

PEMBAHASAN

Perspektif Barat tentang poligami dan institusi harem dalam masyarakat Muslim dibentuk oleh pola stereotip yang konsisten dan saling memperkuat saat melakukan analisis menyeluruh terhadap kumpulan data yang beragam, termasuk lukisan akademik abad ke-19, catatan perjalanan, dokumen kebijakan kolonial, dan arsip sejarah.¹³ Pola ini tidak muncul secara kebetulan atau karena ketidaktahuan; sebaliknya, itu adalah konstruksi diskursif yang memiliki tujuan ideologis dan politik tertentu. Mekanisme kebijakan kolonial mengubah landasan sosial-ekonomi masyarakat terjajah. Selain itu, stereotip ini dikuatkan dan diberi dimensi material yang konkret. Dalam tulisan ini, kami akan membahas empat aspek utama dari pemahaman orientalisme tentang poligami dan harem. Mereka digambarkan sebagai simbol despotisme politik, sebagai

¹⁰ Ahmad Masfuful Fuad, "PERGOLAKAN POLITIK MESIR MASA KOLONIAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 197–207.

¹¹ Ni Luh et al., "Politik Tubuh Perempuan Antara Kontrol Sosial Dan Resistensi," *Socio-Political Communication and Policy Review* 2, no. 3 (2025): 1–12.

¹² Suharyo, "Paradigma Kritis Dalam Penelitian Wacana," *NUSA* 13, no. 3 (2018): 482–92.

¹³ Fahmi Tizani, "Orientalism in the Cinématographe : The Visualization of Eastern-Exoticism in Alexandre Promio 's Recorded Films in Egypt 1897," *SOCIO HISTORICA : JOURNAL OF ISLAMIC SOCIAL HISTORY* 4, no. 1 (2025): 11–40.

tempat fantasi voyeuristik, sebagai tanda keterbelakangan saintifik, dan sebagai sasaran intervensi material kolonial. Kami juga akan menunjukkan bagaimana semua aspek ini saling berhubungan dan membentuk sebuah "Timur" yang imajiner tetapi memiliki konsekuensi yang sangat nyata.

A. Poligami simbol despotisme politik

Poligami berkembang dari sebuah praktik sosial menjadi sebuah metafora politik yang kuat dalam pandangan politik Barat pasca-Pencerahan, terutama yang dipengaruhi oleh tulisan Montesquieu tentang despotisme. Mereka yang mempraktikkan poligami dianggap otoriter, tidak rasional, dan terbelakang. Dalam seni visual, pola ini terlihat sangat akrab. Meskipun lukisan Jean-Léon Gérôme seperti *The Slave Market* (c. 1866) atau *The Snake Charmer* (c. 1879) tidak selalu menggambarkan harem secara eksplisit, mereka menciptakan suasana di mana tubuh perempuan Timur yang terekspos menjadi komoditas ekonomi seksual yang dikuasai oleh penguasa laki-laki yang tidak terlihat. Dalam *The Sultan's Favorite*, yang disukai oleh penganut aliran orientalisme, ada dua pesan yang disampaikan oleh adegan sultan di harem: pertama, bahwa kekuasaan politik seorang penguasa Timur ditunjukkan dan diukur melalui kendalinya atas akses seksual eksklusif terhadap banyak perempuan; kedua, subyek politik dalam masyarakat seperti itu adalah seperti perempuan dalam harem, pasif, dan tidak memiliki otonomi.¹⁴

Catatan perjalanan (travelogues) menjadi saluran penting untuk memproyeksikan stereotip ini dengan otoritas pengalaman "langsung". Gustave Flaubert dalam catatan perjalanannya ke Mesir (1849-1851) secara eksplisit menghubungkan erotisisme dengan "kehidupan Timur".¹⁵ Kunjungannya ke penari terkenal Kuchuk Hanem tidak hanya dicatat sebagai pengalaman pribadi, tetapi diangkat menjadi gambaran umum tentang sensualitas perempuan Mesir yang liar, tak terpuaskan, dan selalu tersedia. Richard Francis Burton, dalam *Personal Narrative of a Pilgrimage to Al-Madinah and Meccah* (1855-56), meski lebih terpelajar dalam bahasa dan adat, tetap membingkai sensualitas perempuan Timur sebagai bagian dari karakter rasial dan iklim yang panas.¹⁶ Generalisasi ini mengaburkan keragaman pengalaman perempuan, status sosial-ekonomi mereka, dan aturan sosial yang sebenarnya mengatur interaksi gender. Sensualitas yang diproyeksikan ini bukan sekadar deskripsi, melainkan alat pembeda (differentiation) yang menegaskan bahwa "Timur" adalah ranah naluri dan nafsu, sementara "Barat" adalah ranah rasionalitas dan pengendalian diri. Generalisasi ini menghilangkan keanekaragaman pengalaman perempuan, status sosial-ekonomi mereka, dan aturan sosial yang sebenarnya mengatur interaksi gender. Sensualitas yang diproyeksikan ini bukan sekadar deskripsi; itu adalah alat pembedaan, yang menegaskan bahwa "Timur" adalah area naluri dan nafsu, dan "Barat" adalah area rasionalitas dan pengendalian diri.

Selanjutnya, cerita ini dikaitkan dengan gagasan nasionalisme Eropa. Dalam kontras dengan kekaisaran-kekaisaran Timur yang poligami, hanya negara-negara Eropa yang monogami. Poligami menunjukkan sistem politik lama yang despotik, hirarkis, dan korup, sementara monogami menunjukkan identitas nasional modern, egaliter, dan rasional. Ini terutama berlaku untuk laki-laki. Oleh karena itu, kritik terhadap poligami dalam wacana publik abad ke-19 sering kali merupakan kritik terhadap sistem politik Ottoman atau Mughal. Poligami bukan hanya masalah budaya atau agama, tetapi juga masalah politik yang membutuhkan intervensi, pertama secara moral dan kemudian secara militer.

Lukisan-lukisan orientalisme tentang harem, seperti *Le Bain Turc* (1862) karya Jean-Auguste-Dominique Ingres atau sejumlah karya Jean-Jules-Antoine Lecomte du Nouÿ, mengklaim menunjukkan aspek rahasia dari ruang pribadi perempuan Muslim. Namun, pemeriksaan karya-

¹⁴ Anne Burnside, *The Sultan's Favorite*, IUniverse, 2009, <https://doi.org/10.24252/jt.v9i1.30988>.

¹⁵ Jean-baptiste Chantoiseau, "A Passage to the Orient : How Flaubert Became a Writer (1849-1851)," *MLN*, 139, no. 4 (2025): 830–45.

¹⁶ Richard Francis Burton, *Personal Narrative of a Pilgrimage to El-Medinah and Meccah*, 2011.

karya ini mengungkapkannya sebagai representasi fantasi voyeuristik laki-laki Barat. Di sini, voyeurisme tidak sekadar "mengintip", itu adalah sebuah posisi subyektif di mana penonton (laki-laki Barat) menikmati akses visual eksklusif ke sebuah ruang yang sebenarnya tertutup baginya. Kuas seniman, yang berfungsi sebagai perantara yang melanggar tabir, memungkinkan akses ini. Adegan-adegannya identik: perempuan-perempuan telanjang atau setengah telanjang dalam keadaan lesu, bermandikan cahaya lembut, tergeletak di atas bantal mewah di dalam arsitektur yang megah tetapi statis. Mereka ada untuk dilihat, didambakan, dan dimiliki baik secara visual maupun imajinasi. Mereka tidak melakukan aktivitas yang menghasilkan hasil.

Sepanjang sejarah, representasi ini sangat tidak akurat. Seperti yang ditunjukkan oleh Leslie Peirce dalam *The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire* (1993), penelitian tentang arsip Ottoman menunjukkan bahwa harem imperial adalah sebuah institusi yang kompleks dengan hierarki, protokol, dan fungsi sosial-politik penting.¹⁷ Harem bukanlah penjara sensual; sebaliknya, itu adalah pusat kekuasaan di mana perempuan dari keluarga penguasa (seperti Valide Sultan, ibu sultan, atau Haseki Sultan, selir utama) memiliki peran politik yang penting. Patronase, diplomasi, pembangunan infrastruktur (melalui wakaf), dan bahkan pergantian kekuasaan adalah semua aktivitas di mana mereka terlibat. Perempuan-perempuan ini memiliki karyawan, pengawal, banyak uang, dan jaringan pengaruh yang luas. Sebagai objek pasif dalam sebuah diorama erotis, lukisan orientalisme dengan sengaja menghilangkan agensi, kecerdikan politik, dan aktivitas ekonomi perempuan ini.

Keanekaragaman pengalaman dalam harem juga dihilangkan. Harem terdiri dari perempuan dari berbagai usia, status, dan latar belakang. Ada yang mengabdikan sebagai budak, ada yang menikah, dan ada yang mengabdikan sebagai pengajar atau pelayan. Dalam lukisan orientalisme, hubungan antar perempuan yang dapat berupa persaingan, persahabatan, aliansi, atau patronase tidak pernah digambarkan. Sebaliknya, lukisan tersebut secara eksklusif berfokus pada hubungan mereka dengan laki-laki (sultan) yang hadir atau tidak. Representasi visual Barat ini menghilangkan suara perempuan seperti yang ditemukan dalam puisi, surat-surat, atau memoar. Harem yang digambarkan adalah tempat di mana tidak ada orang yang berbicara, tidak ada konflik, dan tidak ada sejarah. Yang ada hanya tubuh dan perabot.

Tidak hanya diskusi tentang orientalisme menambah kesalahan, tetapi juga menghilangkan konteks penting untuk memahami harem dan poligami dalam masyarakat Muslim pra-kolonial. Dalam fikih Islam klasik, ada banyak syarat dan batasan yang mengatur poligami. Keadilan (adl) terhadap para istri dikaitkan langsung dengan ayat Al-Qur'an yang memungkinkan poligami (QS An-Nisa: 3).¹⁸ Para fuqaha (ahli hukum) berdebat tentang arti keadilan ini, dan banyak yang berpendapat bahwa keadilan yang sempurna hampir tidak mungkin dicapai, yang secara tidak langsung mendorong monogami. Selain itu, tanggung jawab finansial yang harus dipenuhi oleh suami terhadap setiap istri dan anak-anaknya, yang dikenal sebagai nafaqah, berfungsi sebagai penghalang ekonomi. Kerangka normatif ini jarang diakui dalam diskusi orientalisme. Poligami dianggap sebagai kebebasan seksual tanpa batas dan kesempatan untuk mengumpulkan perempuan, bukan sebagai institusi yang dibebani tanggung jawab hukum dan moral. Poligami berubah dari praktik hukum yang rumit menjadi ciri budaya yang despotik dengan menghilangkan kerangka fikih.

Bukti kuat tentang agensi hukum dan ekonomi perempuan Muslim ditemukan dalam arsip pengadilan Islam (sijillat) dari zaman Utsmaniyah, Mamluk, dan Mughal. Perempuan memiliki hak properti yang berbeda dari suami mereka, termasuk mahr, atau maskawin, yang hanya mereka

¹⁷ Leslie P. Peirce, *The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire*, 1993.

¹⁸ Jahira Salsabila, Nurul Imam, and Wildan Taufiq, "Penafsiran Poligami Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisā' Ayat 3 Dan 129 : Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce," *Journal of 'Ulūm Al-Qur'Ān and Tafsīr Studies* 20, no. 10 (2020): 1–11.

miliki. Mereka membeli, menjual, menyewakan, mendirikan wakaf, dan berdagang properti. Selain itu, mereka menggunakan pengadilan untuk menuntut hak-hak mereka, seperti menuntut nafkah dari suami mereka, mengajukan protes terhadap perlakuan tidak adil, atau bahkan mengajukan perceraian (fasakh atau khulu). Jika istri merasa diperlakukan secara tidak adil oleh suami mereka, mereka memiliki hak untuk menggugat suami mereka dalam konteks poligami. Fakta sejarah ini bertentangan dengan pembicaraan orientalisme yang menggambarkan perempuan sebagai budak atau harta benda. Dengan menghapus lembaga perempuan ini, masyarakat Muslim digambarkan sebagai masyarakat yang secara fundamental patriarkal dan statis, yang membutuhkan "penyelamatan" atau "pembaruan" dari sumber luar.

Dalam masyarakat prakolonial, poligami biasanya memiliki alasan ekonomi dan sosial, bukan hanya kepuasan seksual. Poligami dapat menjadi strategi untuk mengelola tenaga kerja dan memperluas jaringan keluarga dalam masyarakat agraris atau pastoral. Laki-laki yang memiliki banyak istri dan anak dapat mengawasi lebih banyak ternak atau lahan. Perkawinan juga berfungsi sebagai sarana penting untuk membangun hubungan antar suku atau klan. Dalam situasi pasca-perang, di mana populasi perempuan mungkin meningkat, poligami dapat berfungsi sebagai mekanisme jaminan sosial untuk melindungi perempuan dan anak yatim. Oleh karena itu, poligami melekat pada struktur ekonomi dan kekerabatan tertentu. Dengan memusatkan perhatian pada aspek seksual semata, pembicaraan orientalisme mengaburkan logika rasional dan menggantikannya dengan cerita tentang nafsu dan ketidaklogikaan primitif.

B. poligami indikator saintifik keterbelakangan rasialisasi

Para pemikir seperti Herbert Spencer, Lewis Henry Morgan, dan John Lubbock mengembangkan model evolusi masyarakat yang linier, dari tingkat "liar" (savagery) ke "barbar" (barbarism) dan akhirnya "beradab" (civilization).¹⁹ Dalam skema ini, bentuk keluarga menjadi indikator utama tahap evolusi. Poligami (khususnya poligini) dikategorikan sebagai ciri masyarakat "barbar", sementara monogami dianggap sebagai puncak evolusi dan identik dengan peradaban Eropa-Kristen yang "maju".²⁰ Otoritas sains kemudian digunakan untuk membakukan penilaian moral yang sebelumnya bersifat religius atau kultural. Poligami bukan lagi sekadar "dosa" atau "kebiasaan aneh", tetapi menjadi gejala dari keterbelakangan evolusioner.

Kerangka ini mewarnai karya sarjana orientalis tentang sejarah Islam periode awal. Dalam *The Life of Mahomet* (1861) karya William Muir,²¹ poligami Nabi Muhammad dibahas bukan dalam konteks sosial-politik Arab abad ke-7, ketika poligami adalah praktik umum dengan banyak tujuan, tetapi sebagai bukti sifat "sensual" Nabi atau sebagai tanda tahap "barbar" masyarakat Arab. Narasi yang sesuai dengan teori evolusi sosial menghindari pertimbangan kontekstual, seperti bagaimana perkawinan digunakan untuk membangun aliansi politik, melindungi janda-janda sahabat yang meninggal, atau mengatur hubungan antar suku. Oleh karena itu, Islam sendiri berada di tingkat kemajuan yang lebih rendah daripada Kristen. Untuk merasionalisasi dan mengukuhkan kekuatan Barat, ilmu pengetahuan menjadi alat.

Pengungkapan fakta bahwa kebijakan material dan administratif kolonial tidak hanya mencerminkan stereotip orientalisme, tetapi juga secara aktif mengubah praktik sosial yang ada dan menciptakan kondisi yang kemudian dianggap sebagai bukti validitas stereotip tersebut merupakan fokus analisis paling penting.²² Ini adalah "mekanisme material" yang membentuk pola diskursif dan memperkuatnya. Sistem perpajakan yang dibangun oleh pemerintah kolonial,

¹⁹ Gede Wisnu Mahayasa; Putu Eka Dambayana Suputra; Gede Yudha Paramartha, "THE EFFECT OF SCAFFOLDING TECHNIQUE ON STUDENTS' WRITING COMPETENCY," *Prasi: Jurnal Bahasa, Seni, Dan Pengajarannya*, no. Vol. 16 No. 01 (2021): 29–39.

²⁰ Yeni Huriyani, *PENGETAHUAN FUNDAMENTAL TENTANG PEREMPUAN*, 2021.

²¹ ESQ William Muir, *THE LIFE OF MAHOMET*, 1861.

²² Gianto Muhammad Roy Purwanto, Atmathurida, "HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT MASA KOLONIAL: SEJARAH PERGOLAKAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT MASA KOLONIAL BELANDA," *An-Nur : Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2005): 1–19.

terutama Prancis di Aljazair dan Maghrib secara keseluruhan, mengadopsi model keluarga inti monogami Barat.²³ Pajak kepala atau pajak rumah tangga dikenakan pada "kepala keluarga" (laki-laki) jika ada satu istri. Keluarga poligini yang besar, yang mungkin terdiri dari satu suami, beberapa istri, anak-anak mereka, dan mungkin kerabat lain, dianggap sebagai satu unit rumah tangga yang dikenakan pajak yang lebih tinggi atau dipaksa untuk mendaftar sebagai beberapa unit yang berbeda. Tekanan ekonomi yang signifikan diberikan oleh kebijakan ini untuk memecah keluarga poligini yang besar menjadi unit yang lebih kecil yang lebih monogami dan "terbaca" oleh birokrasi kolonial. Sebagai akibatnya, struktur kekerabatan yang sebelumnya memberikan dukungan sosial dan ekonomi telah dilemahkan.

Salah satu tindakan kolonial yang paling signifikan adalah penerapan sistem kepemilikan privat individualis Barat sebagai pengganti sistem kepemilikan yang kompleks yang didasarkan pada hukum adat dan fikih Islam.²⁴ Perempuan memiliki hak properti yang kuat dalam fikih: mahr, atau maskawin, adalah propertinya yang tak tersentuh, dia berhak memiliki dan mengelola uang dan propertinya sendiri, dan dia memiliki hak waris.²⁵ Dalam sistem tanah kolonial, seperti Code de l'indigénat atau Permukiman Permanen, "kepala keluarga" biasanya adalah pemilik tanah. Ini menyebabkan laki-laki mengambil alih kontrol properti dari perempuan, meningkatkan ketergantungan ekonomi perempuan. Seorang perempuan yang masuk ke dalam pernikahan poligini dalam kondisi baru ini kehilangan kontrol atas sumber daya yang sebelumnya dilindungi oleh hukum Islam, yang membuatnya lebih rentan. Administrator dan penulis kolonial kemudian mengamati kondisi kerentanan yang dihasilkan oleh kolonialisme. Kondisi ini dianggap sebagai bukti eksploitatif poligami itu sendiri. Sebuah lingkaran setan terbentuk: eksploitasi diciptakan oleh intervensi kolonial, lalu digunakan sebagai alasan untuk intervensi lebih lanjut dan superioritas moral.

Dengan mengeksplor tanaman monokultur untuk ekspor, merampas tanah, dan mengintegrasikan masyarakat ke dalam ekonomi kapitalis global, kolonialisme merusak ekonomi subsisten lokal.²⁶ Laki-laki didorong untuk menjadi migran atau buruh upahan. Logika ekonomi poligami berubah secara signifikan dalam konteks ini. Poligami sering berubah menjadi cara bagi laki-laki yang sudah termarginalkan secara ekonomi untuk memberikan tanggung jawab kepada beberapa istri. Itu awalnya adalah cara untuk mengelola sumber daya kolektif dalam keluarga besar, di mana setiap istri dan anak-anaknya dapat berkontribusi pada pertanian atau kerajinan. Suami-istri ini mungkin dipaksa mencari nafkah sendiri melalui kerja upahan atau sektor informal. Meskipun transformasi ini merupakan konsekuensi langsung dari penghancuran ekonomi tradisional yang dilakukan oleh kolonialisme, dalam wacana kolonial, itu kembali dikaitkan dengan sifat "malas" dan "eksploitatif" orang pribumi daripada dengan kondisi struktur ekonomi yang diubah paksa.

Pemerintah kolonial sering "membekukan" dan mengkodifikasi hukum keluarga pribumi, seperti hukum Islam, dalam bentuk yang kaku dan terpilih, lalu mengaturnya melalui pengadilan

²³ Vitri Puspita Sari, "Poligami Di Minangkabau Pada Masa Kolonial," *HISTORIA : Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 8, no. 1 (2020).

²⁴ Dewi Fransiska Mamonto, Selfrinda Rezkita Mahmud, and Risnawati Utina, "The Evolution of Islamic Civil Law in Indonesia: Developments, Contemporary Challenges, and Future Directions," *Nusantara : Journal of Law Studies* 3, no. 2 (2024): 147–58, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17385985>.

²⁵ Sahrul Gunawan and Muh Ahsan Kamil, "ANALISIS KOMPARATIF HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)* 2, no. 1 (2025): 144–61.

²⁶ Perkembangan Sosial et al., "THE IMPACT OF WESTERN COLONIALISM ON SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN SOUTHEAST ASIA," *JIIIC : Jurnal Intelek Insan Cendekia* 2, no. 12 (2025): 18207–13.

kolonial.²⁷ Ini adalah bagian dari upaya untuk membuat populasi terjajah "terbaca" dan dapat dikontrol, menurut Gayatri Chakravorty Spivak.²⁸ Pengadilan keluarga menjadi tempat negara kolonial menetapkan pajak dan tanggung jawab militer, mencatat kelahiran, mengawasi warisan, dan menentukan siapa yang menikah dengan siapa. Selama proses ini, interpretasi hukum Islam yang lebih patriarkal dan ketat sering dipilih dan diberlakukan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka lebih sesuai dengan pandangan kolonial tentang masyarakat Timur yang statis dan lebih mudah diatur. Oleh karena itu, perempuan tidak dibebaskan dari patriarki tradisional oleh kolonialisme; sebaliknya, hukum yang beku seringkali mengukuhkannya. Seperti yang dikatakan Spivak, "menyelamatkan perempuan coklat dari laki-laki coklat" ternyata hanyalah alibi untuk proyek kontrol yang lebih besar. Dalam praktiknya, posisi perempuan seringkali menjadi lebih buruk karena kehilangan mekanisme hukum dan sosial yang melindungi mereka dalam kerangka yang lebih dinamis.

C. deconstructing orientalisme dan poligami

Studi ini menemukan bahwa perspektif orientalisme tentang poligami adalah konstruksi diskursif yang terkait erat dengan gagasan kekuasaan kolonial dan didukung oleh intervensi material transformatif.²⁹ Pernyataan ini lebih dari sekadar observasi historis; itu adalah penghancuran mesin wacana yang canggih. Mesin ini bekerja dalam sirkuit tertutup yang memperkuat pengetahuan, kekuatan, dan realitas material. Poligami distereotipkan sebagai simbol "otherness" di Timur melalui cerita tentang despotisme-sensualitas, keterbelakangan saintifik, dan penindasan perempuan pasif. Ini adalah institusi yang kuat dan tak terbantahkan yang menunjukkan peradaban yang lebih rendah dan terbelakang. Namun, fokus analisis ini harus diarahkan pada fungsi ganda stereotip tersebut: ia berfungsi sebagai legitimasi ideologis untuk "misi peradaban" (misi civilisatrice) sekaligus sebagai penutup untuk proyek ekonomi-politik seperti pajak, properti, dan administrasi. Proyek-proyek ini mendistorsi praktik sosial lokal, mengikis hak ekonomi perempuan, dan, dalam ironi yang tragis, menciptakan kondisi ketimpangan yang kemudian dianggap sebagai bukti empiris kebenarannya. Kolonialisme klasik tidak menghilangkan struktur dan sirkuit wacana ini. Mereka masih ada, berubah menjadi kebijakan diskriminatif, budaya populer, dan retorika Islamofobia modern seperti femonasionalisme.³⁰ Oleh karena itu, pembelaan poligami bukanlah, dan sekali-kali tidak boleh disalahartikan sebagai, pembelaan terhadap debat orientalisme dan kritik terhadap logika ekonomi-politik kolonial. Ia adalah penyelidikan kritis yang mendasar tentang ketidakadilan material dan epistemik di mana satu pihak kolonial Barat dan keturunannya memonopoli hak untuk mendefinisikan, mengkategorikan, dan mengatur realitas pihak lain. Sebuah percakapan antarbudaya yang setara, penuh empati, dan bebas dari prasangka institusional hanya dapat dibangun dengan mengatasi bias ganda ini bias dalam melihat dan bias dalam mengatur.

Untuk memahami orientalisme sepenuhnya, kita harus memulai dengan buku penting Edward Said, *Orientalism* (1978).³¹ Said mendefinisikan orientalisme sebagai "gaya Barat untuk mendominasi, merestrukturisasi, dan memiliki wewenang atas Timur" daripada sebagai studi "Timur" yang netral. Ia adalah lembaga bisnis yang berurusan dengan Timur dengan membuat pernyataan tentangnya, mengajar, menjajah, dan mengaturnya. Dalam kerangka ini, "Timur"

²⁷ Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, "PERKEMBANGAN HUKUM INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN UNIFIKASI DAN KODIFIKASI HUKUM," *Jurnal Advokasi* 5, no. 2 (2015): 109–22.

²⁸ Radzki Rinanto Sigit Indah Suryawati, Alexander Seran, "Third World Subaltern Women in the Review of Feminism Theory Postcolonial Gayatri Chakravorty Spivak," *FOCUS Journal of Social Studies* 2, no. 2 (2021): 88–96.

²⁹ Akhmad Muzakki, "Dekonstruksi Orientalisme (Telaah Atas Pemikiran Leonard Binder)," *Ulul Albab* 6, no. 1 (2005).

³⁰ Jamalul Muttaqin and Syamsiyani, "DISKURSUS KETIDAKADILAN GENDER: KRITIK TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI," *SETARA : Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 2 (2023): 58–68.

³¹ Edward W. Said, *Orientalism*, 1978.

berfungsi sebagai kontras dari "Barat", yang didefinisikan sebagai rasional, maju, maskulin, dan demokratis. Sebaliknya, "Timur" menjadi irasional, terbelakang, feminin, dan despotik.

Poligami adalah praktik yang berbeda dalam budaya Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika Utara yang menjadi pusat orientalisme. Ia berbeda secara hukum (sebagai bagian dari fikih Islam dengan persyaratan ketat, atau praktik adat pra-Islam), ekonomi (sehubungan dengan warisan, pertanian, dan aliansi suku), dan sosial. Namun, keragaman ini direduksi menjadi monolit simbolik dalam bahasa orientalisme. Dengan mengatakan bahwa wacana tidak hanya menyampaikan kenyataan, tetapi juga menciptakan objek yang dibicarakan, Foucault memberi kita alat untuk memahami hal ini. Dalam diskusi tentang orientalisme, "poligami Timur" dianggap sebagai objek pengetahuan yang stabil, dapat dikategorikan, dan dikutip.

Tiga Pilar Narasi Utama Stereotipisasi ini bersandar pada tiga pilar narasi yang saling terkait : pertama, narasi Despotisme Sensualitas dalam cerita ini, poligami dikaitkan dengan politik tubuh dan kekuasaan sewenang-wenang. Metafora yang kuat terkait dengan harem, yang digambarkan sebagai ruang terpencil yang dipenuhi dengan perempuan yang tidak bergerak yang menunggu kepuasan dari penguasa laki-laki.³² Poligami dianggap sebagai manifestasi dari despotisme politik Timur di rumah. Suami yang memiliki kekuasaan mutlak di ruang pribadi adalah sultan atau Pasha. Perempuan digambarkan sebagai objek sensual yang malas, terkurung dalam kemewahan dekaden dalam lukisan Orientalis abad ke-19. Oleh karena itu, poligami bukan lagi institusi sosial yang baik atau buruk, melainkan tanda-tanda dari sifat nasional dan keagamaan yang buruk, seperti nafsu yang tidak terkendali, kemalasan, dan korupsi kekuasaan. Storyline ini mengabaikan masalah hukum tentang nafkah, misyar, atau perjanjian pra-nikah, dan peran perempuan dalam keluarga yang luas.

Kedua, Kisah tentang Keterbelakangan Sains dan Rasial yang dimana Poligami diletakkan pada skala evolusi peradaban pada abad ke-19, ketika sains (terutama darwinisme sosial dan antropologi fisik) menjadi alat legitimasi kekuasaan.³³ Monogami dikaitkan dengan pencerahan, kemajuan, dan ras "yang lebih tinggi". Poligami sekarang dianggap sebagai tanda stagnasi evolusioner. Para etnografi dan antropolog kolonial sering mengaitkan poligami dengan "ras" atau "suku" tertentu yang dianggap lebih rendah, atau iklim panas yang dianggap merangsang nafsu. Poligami dikaitkan dengan "nature" orang Timur yang abadi dan dipisahkan dari konteks hukum Islam yang mungkin membatasinya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat ini belum mencapai tingkat moral dan sosial yang sebanding dengan Eropa.

Ketiga, Narasi Penindasan Perempuan Pasif yang dimana Pilar legitimasi moral yang paling sering digunakan adalah yang ini.³⁴ Dalam cerita ini, perempuan poligami adalah korban yang sama. Mereka tanpa suara, agensi, dan selalu menderita. Dalam skrip kolonial, mereka disebut sebagai "perempuan yang diselamatkan". Gambaran ini mengaburkan fakta bahwa perempuan di masyarakat ini memiliki banyak peran dan cara untuk bertindak: sebagai ibu yang kuat, pemilik properti, atau bahkan orang yang memulai perceraian. Orientalisme menggambarkan perempuan Timur sebagai pasif sepenuhnya. Ini sekaligus menunjukkan bahwa perempuan Barat lebih baik daripada perempuan Barat yang "terbebaskan", dan bahwa maskulinitas kesatria Barat memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan perempuan ini. Poligami dianggap sebagai tanda terakhir dari patriarki Timur yang kejam. Ini berbeda dengan patriarki Barat, yang dianggap lebih cerdas dan terdidik oleh nilai-nilai Kristen.

Ini adalah saat analisis menjadi penting. Stereotip ini melakukan dua fungsi penting bagi proyek kolonial, dan ia tidak dapat berfungsi di ruang hampa. Stereotip tentang poligami yang

³² Nafisah Widhah Inayah et al., "Membongkar Stereotipe : Peran Sosio-Antropologi Dalam Mendorong Pemberdayaan Perempuan Dan Mengatasi Pernikahan Dini," *PROSIDING SEMINAR KESEHATAN NASIONAL SEXOPHONE* 4, no. 2 (2024): 51–60.

³³ Fahrudin, "DIALEKTIKA POLIGAMI DALAM NARASI NORMATIF DAN POTRET EMPIRIS," *AHKAM* 9, no. 2 (2021): 301–24.

³⁴ Aulya, "Hegemoni Kekuasaan Dalam Politik Hukum Keluarga Di Indonesia."

otoriter, terbelakang, dan menindas memberikan legitimasi ideologis untuk intervensi dan dominasi. "Misi peradaban" diterima dengan baik: kita harus mengajar mereka, mengubah hukum mereka, mendidik perempuan mereka, dan membebaskan mereka dari praktik barbar seperti poligami. Ini adalah wajah imperialisme yang ditutupi oleh humanisme. Kampanye anti-poligami menjadi bagian dari pedagogi kolonial untuk menghasilkan subjek-subjek yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Eropa. Namun, yang lebih halus dan sering terlupakan adalah fungsi keduanya: Sebagai Kedok untuk Proyek Ekonomi-Politik. Di balik retorika penyelamatan ini, administrasi kolonial melancarkan intervensi material yang justru mendistorsi dan membekukan praktik sosial, dengan konsekuensi yang sangat merugikan perempuan. Intervensi ini meliputi:

- Sistem Perpajakan

Pemerintah kolonial sering mengganti sistem perpajakan yang kompleks dengan sistem yang terpusat dan monetaris.³⁵ Poligami, yang sebelumnya bisa jadi merupakan strategi untuk mengelola unit pertanian yang besar atau aliansi klan, tiba-tiba menjadi beban ekonomi yang lebih berat karena setiap istri atau rumah tangga dikenai pajak secara terpisah. Ini mengubah logika ekonomi dari dalam.

- Hukum Properti dan Kepemilikan Tanah

Kolonialisme memperkenalkan konsep kepemilikan tanah privat individual (misalnya, melalui Torrens Act atau Permanent Settlement), yang menggantikan sistem kepemilikan bersama, adat, atau yang diatur oleh wakaf. Perubahan radikal ini sering kali meminggirkan hak-hak perempuan yang sebelumnya dijamin dalam sistem adat atau hukum Islam. Hak perempuan untuk mengelola atau mewarisi tanah tergerus oleh hukum kolonial yang bias gender dan patriarkal-Eropa.³⁶ Distorsi dalam sistem properti ini sering kali meningkatkan ketergantungan ekonomi perempuan pada laki-laki.

- Administrasi Hukum dan Pengadilan

Selama periode kolonial, sistem peradilan ganda didirikan: pengadilan sipil untuk kasus pidana atau perdata dan pengadilan pribumi atau agama untuk kasus keluarga. Administrasi kolonial membekukan dan memformalkan praktik seperti poligami dengan memisahkan hukum keluarga (termasuk poligami) sebagai domain "agama" atau "adat" yang "primitif" sambil mengawasi hukum pidana dan properti.³⁷ Sekarang, negara kolonial mengkodifikasi dan mengelola apa yang mungkin fleksibel, dikelola secara komunitas, atau jarang dilakukan karena syarat ekonomi yang berat. Ini mengubah hukum keluarga menjadi lebih ketat dan seringkali patriarkal.

Ini adalah ironi yang mengerikan dan inti dari analisis ini. Hak ekonomi perempuan dirusak oleh tindakan kolonial yang melibatkan pajak, properti, dan administrasi. Ini menciptakan kondisi ketimpangan yang baru dan lebih ketat. Sekarang teralienasi perempuan, yang sebelumnya dapat mengakses sumber daya melalui jaringan klan atau sistem adat. Ekonomi mereka menjadi lebih rentan. Administrator, misionaris, dan orientalis kolonial kemudian melihat bagaimana masyarakat menjadi lebih tergantung, terpinggirkan, dan "tertindas" dalam kerangka ekonomi baru ini. Perempuan memang miskin, menderita, dan tertindas karena poligami. Penderitaan yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi dan politik kolonial mereka sendiri kemudian dikaitkan dengan poligami dan masyarakat Timur.³⁸ Oleh karena itu, terbentuk sebuah sirkuit tertutup kebenaran,

³⁵ Uswatun Hasanah et al., "Hukum Keluarga Islam Pada Masa Penjajahan Belanda," *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 4 (2025): 920–27.

³⁶ Nurul Fadilah et al., "DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN TERHADAP DETERMINASI MAHAR SEBAGAI CERMINAN HARGADIRI DAN MARTABAT PEREMPUAN," *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 5, no. 1 (2025): 120–30.

³⁷ Muhammad Zikri et al., "Analisis Penundaan Kodifikasi Terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam Era Orde Lama," *Al Fuadiy : Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2025): 121–35.

³⁸ Ita Rodiah1 Universitas Bangkit Adi Saputra, "Ketidaksetaraan Gender, Wahabisme Dan Visi Saudi 2030: Kritik Feminisme Postkolonial Melawan Ketidakadilan Di Arab Saudi," *Abdurrauf Law and Sharia* 1, no. 2 (2024): 88–111.

juga dikenal sebagai ramalan self-fulfilling, di mana wacana menciptakan kebijakan dan kebijakan menciptakan kondisi yang membenarkan wacana. Ketidakadilan epistemik menghasilkan "bukti" ketidakadilan material, dan sebaliknya.

Struktur material dan sirkuit wacana ini masih hidup. Ia berubah untuk menyesuaikan diri dengan semangat zaman modern. Stereotip tentang harem dan perempuan pasif terus diterapkan dalam film, novel, dan media massa. Poligami tetap menjadi simbol "otherness" yang sensual dan terbelakang, baik dalam film Hollywood lama maupun reality show tentang "sister wives" yang dieksotisasi. Banyak negara Barat dengan penduduk Muslim memiliki kebijakan imigrasi dan integrasi yang secara khusus mensasar poligami, sering kali dengan alasan "melindungi nilai-nilai nasional" atau "menyelamatkan perempuan imigran."³⁹ Ini mengabaikan bahwa praktik ini tidak banyak dan bahwa larangan kriminal sering membuat perempuan menjadi lebih rentan dan tanpa perlindungan hukum.

Konsep Femonasionalisme dalam Retorika Islamofobia dan Femonasionalisme, yang dikembangkan oleh Sara Farris, sangat relevan di sini.⁴⁰ Ia menjelaskan bagaimana para aktor nasionalis dan sayap kanan menggunakan retorika kesetaraan gender untuk menyerang Islam dan mengusir imigran. Poligami adalah tropenya yang ideal. Nasionalis feminis mungkin mengatakan, "Kami mendukung pembebasan perempuan, dan karena itu kami menentang Islam (yang diwakili oleh poligami)." Oleh karena itu, ketidakadilan gender yang sebenarnya diabaikan dan digunakan sebagai alat untuk kampanye anti-Islam dan anti-Xenofobia. Wanita Muslim sekali lagi dianggap sebagai korban pasif yang harus diselamatkan oleh laki-laki Muslim imigran, yang mengabaikan suara dan organisasi mereka sendiri.

Oleh karena itu, upaya keadilan ganda terdiri dari merevisi diskusi orientalisme tentang poligami dan mengkritik logika ekonomi-politik kolonialnya. Pertama, keadilan epistemic mengembalikan hak masyarakat untuk mendefinisikan realitas mereka sendiri dalam kompleksitasnya, melawan monopoli representasi Barat.⁴¹ Kedua, keadilan material melacak bagaimana struktur ketimpangan saat ini berakar pada intervensi kolonial, bukan pada "kodrat" agama atau budaya tertentu. Ini bukan proyek untuk membela poligami; sebaliknya, ini adalah perbedaan yang sangat penting. Meskipun seseorang mungkin sangat mengkritik poligami sebagai praktik yang dapat mengeksploitasi, mereka tetap tidak setuju dengan cara kolonialisme dan orientalisme membingkai, mengatur, dan menggunakan masalah ini untuk kepentingan mereka sendiri. Ketidakadilan gender harus dipisahkan dari stigmatisasi budaya dan manipulasi politik. Dengan membongkar warisan bias ganda ini bias dalam cara kita melihat dan bias dalam cara kita mengatur kita dapat melakukan analisis yang lebih jelas.

Hanya dengan memotong rantai warisan ini kita dapat mencapai dialog antarbudaya yang sebenarnya.⁴² Ini menunjukkan untuk memahami bagaimana percakapan dan struktur masa lalu membentuk pandangan dan keadaan saat ini. Mendengarkan Subjektivitas yang Majemuk: Melibatkan suara perempuan dari masyarakat tersebut, bukan sebagai korban yang sama, tetapi sebagai aktor yang memiliki pengalaman, kritik, dan pendekatan yang berbeda tentang poligami dan patriarki. Memisahkan Kritik dari Stigma: Mengembangkan kritik terhadap praktik sosial dalam konteks apa pun yang berangkat dari keadilan dan hak asasi manusia yang universal. Ini dilakukan

³⁹ Marli Candra, "Islamofobia, Radikalisme Dan Moderasi Beragama: Refleksi Terhadap Pemahaman Keagamaan," *Peradaban Journal Religion and Society* 3, no. 2 (2024): 157–70.

⁴⁰ Ahmad Muthohar Siti Muri'ah, "Islam Dan Pembebasan Perempuan (Ikhtiar Rekonstruksi Metodologi Penafsiran Teks)," *Academia* 3, no. 1 (2000): 1–22.

⁴¹ Ubabuddin Sri Endang Puji Astuti, "SIGNIFIKANSI DAN KONTRIBUSI PENDEKATAN SEJARAH DALAM STUDI ISLAM," *JUTEQ: Jurnal Teologi & Tafsir* 2, no. 2 (2025): 479–501.

⁴² Miftakhul Arif, "Modernisasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Respons Ulama Atas Rancangan Ordonansi Perkawinan Era Hindia-Belanda," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2025): 108–23.

dengan sensitivitas kontekstual dan bebas dari agenda politik yang mendiskreditkan peradaban secara keseluruhan. Kritis terhadap Instrumentalisasi: Jangan tertipu oleh penggunaan poligami dan masalah perempuan dalam retorika politik modern, baik dari femonasionalisme maupun otoritarianisme negara yang menggunakan "perlindungan perempuan" untuk mengatur populasi.

KESIMPULAN

Pandangan orientalisme Barat (abad ke-18-awal ke-20) terhadap poligami dalam masyarakat Muslim merupakan konstruksi stereotip yang direduksi menjadi tiga narasi utama: simbol despotisme dan sensualitas liar Timur, indikator saintifik keterbelakangan, serta bukti penindasan perempuan pasif. Konstruksi ini dicapai melalui penghapusan sistematis atas konteks hukum Islam, agensi perempuan, variasi praktik, dan logika sosial-ekonomi yang mendasarinya. Lebih dari sekadar wacana, stereotip ini berfungsi ganda sebagai legitimasi ideologis untuk "misi peradaban" sekaligus sebagai kedok untuk intervensi material kolonial melalui sistem pajak, hukum properti, dan kodifikasi hukum yang kaku, yang justru mengikis hak ekonomi perempuan, mendistorsi struktur sosial, dan menciptakan kondisi eksploitasi baru—sebuah ironi di mana kebijakan kolonial sendiri menghasilkan penderitaan yang kemudian dijadikan bukti kebenaran stereotipnya. Warisan wacana ini terus bereproduksi dalam budaya populer, kebijakan diskriminatif, dan retorika Islamofobia kontemporer seperti femonasionalisme. Oleh karena itu, dekonstruksi terhadap wacana orientalisme dan pemahaman atas dimensi materialnya menjadi prasyarat penting untuk keadilan epistemik dan material, serta untuk membangun dialog antarbudaya yang setara dan kontekstual, yang memisahkan kritik terhadap ketidakadilan gender dari stigmatisasi budaya dan instrumentalisasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Leila. *Women And Gender In Islam Historical Roots Of A Modern Debate*, 1992.
- Arif, Miftakhul. "Modernisasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Respons Ulama Atas Rancangan Ordonansi Perkawinan Era Hindia-Belanda." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 11, No. 1 (2025): 108-23.
- Aulya, Aidil. "Hegemoni Kekuasaan Dalam Politik Hukum Keluarga Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 2, No. 1 (2022): 790-801.
- Bangkit Adi Saputra, Ita Rodiah1 Universitas. "Ketidaksetaraan Gender, Wahabisme Dan Visi Saudi 2030: Kritik Feminisme Postkolonial Melawan Ketidakadilan Di Arab Saudi." *Abdurrauf Law And Sharia* 1, No. 2 (2024): 88-111.
- Burnside, Anne. *The Sultan's Favorite. Iuniverse*, 2009. <https://doi.org/10.24252/Jt.V9i1.30988>.
- Burton, Richard Francis. *Personal Narrative Of A Pilgrimage To El-Medinah And Meccah*, 2011.
- Candra, Marli. "Islamofobia , Radikalisme Dan Moderasi Beragama : Refleksi Terhadap Pemahaman Keagamaan." *Peradaban Journal Religion And Society* 3, No. 2 (2024): 157-70.
- Chantoiseau, Jean-Baptiste. "A Passage To The Orient : How Flaubert Became A Writer (1849-1851)." *Mln*, 139, No. 4 (2025): 830-45.
- Fadilah, Nurul, Ahmad Muzakki, Universitas Islam, Zainul Hasan, Genggong Probolinggo, Universitas Islam, Zainul Hasan, Et Al. "Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Determinasi Mahar Sebagai Cerminan Hargadiri Dan Martabat Perempuan." *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 5, No. 1 (2025): 120-30.
- Fahrudin. "Dialektika Poligami Dalam Narasi Normatif Dan Potret Empiris." *Ahkam* 9, No. 2 (2021): 301-24.
- Fuad, Ahmad Masfuful. "Pergolakan Politik Mesir Masa Kolonial Dan Dampaknya Terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, No. 2 (2016): 197-207.

- Gunawan, Sahrul, And Muh Ahsan Kamil. "Analisis Komparatif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Pembagian Harta Warisan." *Integrative Perspectives Of Social And Science Journal (Ipssj)* 2, No. 1 (2025): 144-61.
- Hasanah, Uswatun, Faisar Ananda, Ibnu Radwan, And Siddiq Turnip. "Hukum Keluarga Islam Pada Masa Penjajahan Belanda." *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, No. 4 (2025): 920-27.
- Huriani, Yeni. *Pengetahuan Fundamental Tentang Perempuan*, 2021.
- Inayah, Nafisah Widhah, Destyn Panggabean, Elly Yuliasari, And Rahayu Deka Fadila. "Membongkar Stereotipe: Peran Sosio-Antropologi Dalam Mendorong Pemberdayaan Perempuan Dan Mengatasi Pernikahan Dini." *Prosiding Seminar Kesehatan Nasional Sexophone* 4, No. 2 (2024): 51-60.
- Indah Suryawati, Alexander Seran, Radzki Rinanto Sigit. "Third World Subaltern Women In The Review Of Feminism Theory Postcolonial Gayatri Chakravorty Spivak." *Focus Journal Of Social Studies* 2, No. 2 (2021): 88-96.
- Luh, Ni, Manik Esa, Tedi Erviantono, And Piers Andreas Noak. "Politik Tubuh Perempuan Antara Kontrol Sosial Dan Resistensi." *Socio-Political Communication And Policy Review* 2, No. 3 (2025): 1-12.
- Mamonto, Dewi Fransiska, Selfrinda Rezkita Mahmud, And Risnawati Utina. "The Evolution Of Islamic Civil Law In Indonesia: Developments, Contemporary Challenges, And Future Directions." *Nusantara: Journal Of Law Studies* 3, No. 2 (2024): 147-58. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17385985>.
- Meyda Yeğenoğlu. *Colonial Fantasies: Towards A Feminist Reading Of Orientalism*, 1998.
- Muhammad Roy Purwanto, Atmathurida, Gianto. "Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda." *An-Nur : Jurnal Studi Islam* 1, No. 2 (2005): 1-19.
- Muttaqin, Jamalul, And Syamsiyani. "Diskursus Ketidakadilan Gender: Kritik Terhadap Praktik Poligami." *Setara : Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, No. 2 (2023): 58-68.
- Muzakki, Akhmad. "Dekonstruksi Orientalisme (Telaah Atas Pemikiran Leonard Binder)." *Ulul Albab* 6, No. 1 (2005).
- Paramartha, Gede Wisnu Mahayasa; Putu Eka Dambayana Suputra; Gede Yudha. "The Effect Of Scaffolding Technique On Students' Writing Competency." *Prasi: Jurnal Bahasa, Seni, Dan Pengajarannya*, No. Vol. 16 No. 01 (2021) (2021): 29-39. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/prasi/article/view/31152/18363>.
- Peirce, Leslie P. *The Imperial Harem: Women And Sovereignty In The Ottoman Empire*, 1993.
- Review, Court, Jurnal Penelitian, And Hukum Vol. "Determinasi Petani Dalam Hukum Agraria Di Indonesia." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 3, No. 1 (2023): 36-50.
- Said, Edward W. *Orientalism*, 1978.
- Salsabila, Jahira, Nurul Imam, And Wildan Taufiq. "Penafsiran Poligami Dalam Al-Qur ' An Surat An- Nisā' Ayat 3 Dan 129 : Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce." *Journal Of 'Ulūm Al-Qur'ān And Tafsīr Studies* 20, No. 10 (2020): 1-11.
- Sari, Vitri Puspita. "Poligami Di Minangkabau Pada Masa Kolonial." *Historia : Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 8, No. 1 (2020).
- Siti Muri'ah, Ahmad Muthohar. "Islam Dan Pembebasan Perempuan (Ikhtiar Rekonstruksi Metodologi Penafsiran Teks)." *Academia* 3, No. 1 (2000): 1-22.
- Sobari, Iman Akbar, La Niampe, La Aso, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Fakultas Ilmu Budaya, And Universitas Halu Oleo. "Citra Stereotipikal Orang Pribumi Pada Novel Jejak Langkah Karya Pramoedya Ananta Toer : Kajian Pascakolonial." *Jpeb Jurnal Penelitian Budaya* 10, No. 1 (2025): 54-76.

- Sosial, Perkembangan, D A N Ekonomi, D I Asia, Amelya Katrina Naibaho, Chintya Sara Devi, Kristiani Della, Magdalena Nauli, Et Al. "The Impact Of Western Colonialism On Social And Economic Development In Southeast Asia." *Jiic : Jurnal Intelek Insan Cendekia* 2, No. 12 (2025): 18207-13.
- Sri Endang Puji Astuti, Ubabuddin. "Signifikansi Dan Kontribusi Pendekatan Sejarah Dalam Studi Islam." *Juteq : Jurnal Teologi & Tafsir* 2, No. 2 (2025): 479-501.
- Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik. "Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi Dan Kodifikasi Hukum." *Jurnal Advokasi* 5, No. 2 (2015): 109-22.
- Suharyo. "Paradigma Kritis Dalam Penelitian Wacana." *Nusa* 13, No. 3 (2018): 482-92.
- Tizani, Fahmi. "Orientalism In The Cinématographe : The Visualization Of Eastern-Exoticism In Alexandre Promio ' S Recorded Films In Egypt 1897." *Socio Historica : Journal Of Islamic Social History* 4, No. 1 (2025): 11-40.
- Wibowo, Budi, Dwi Agung Hernanto, And Penulis Publikasi Pameran. *Sonobudoyo Sejarah Dan Identitas Keistimewaan*, 2018.
- William Muir, Esq. *The Life Of Mahomet*, 1861.
- Yunika Sari, Pujawati, Miftahul Ulum Bahtiar. "Orientalism: Edward Said's Postcolonial Thoughts And Theories Against The Eastern World And Islam." *Gunung Djati Conference Series* 23 (2023): 145-64.
- Zikri, Muhammad, Faisar Ananda, Ibnu Radwan, Siddik Turnip, Alamat Jl, William Iskandar, Medan Estate, Et Al. "Analisis Penundaan Kodifikasi Terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam Era Orde Lama." *Al Fuadiy : Hukum Keluarga Islam* 7, No. 1 (2025): 121-35.